

## RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Unit Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												Keterangan		
					2017						2018								
					Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April		Mei	
1.	Penerapan Pelayanan Publik Terintegrasi	a. Evaluasi Penerapan Pelayanan Publik Satu Atap	Review SOP: Layanan Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat, Penyaluran Delegasi Masyarakat	Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Protokol dan Pusdatin	√														
		b. Penyusunan Regulasi Kebijakan Pelayanan Satu Atap	SOP : Layanan Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat dan Penyaluran Delegasi Masyarakat			√	√												
		c. Penetapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap	SK Sekjen tentang Penetapan Layanan Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat dan Penyaluran Delegasi Masyarakat																
		d. Penerapan Kebijakan Pelayanan Satu Atap	a. Pelayanan Satu Atap					√											
b. Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi LAPOR					√														
c. Terbentuknya Forum Komunikasi Pengelola Pengaduan Masyarakat					√														
2.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Evaluasi Standard Pelayanan	a. Penyediaan Risalah	Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP dan Biro Pimpinan					√										
			b. Penyediaan Bahan Rapat					√											
			c. Konsep Dasar Pertanyaan Rapat					√											
			d. Pendampingan Delegasi					√											
			e. Penyusunan Laporan Delegasi Dalam dan Luar Negeri					√											
		a. Layanan Pemberitaan Melalui Website dan Media Sosial	Biro Pemberitaan Parlemen								√								
				b. Layanan Pemberitaan melalui Majalah dan Buletin Parlemen								√							
				c. Layanan Pemberitaan melalui TV Parlemen								√							

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Unit Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												Keterangan
					2017						2018						
					Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	
2.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Evaluasi Standard Pelayanan	a. Konsep NA dan Draft RUU	Pusat Perancangan UU							√						
			b. Pemantauan Pelaksanaan UU								√						
			c. Konsep Keterangan Tertulis DPR								√						
			Analisis Surat Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat							√						
			a. Penelitian atau Pengkajian	Pusdatin									√				
			b. Pengelolaan Jaringan Internet	BDTI									√				
			c. Pengelolaan website DPR RI	BDTI									√				
			d. Layanan Perpustakaan	Bagian Perustakaan									√				
			e. Layanan Kearsipan	Bidang Arsip dan Museum									√				
			Analisis Audit BPK	Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara										√			
			Analisis APBN	Pusat Kajian Anggaran										√			
			Layanan Administrasi Keuangan	Biro Keuangan dan Perencanaan										√			
			a. Layanan Kesehatan	Biro Umum										√			
			b. Sistem Pengamanan											√			

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Unit Pelaksana	Waktu Pelaksanaan												Keterangan	
					2017						2018							
					Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April		Mei
2.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Layanan Informasi Publik	Hasil Survey	Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Biro Pimpinan, Biro Pemberitaan Parlemen, Pusat Pengawasan UU, Pusat Akutabilitas Keuangan Negara, Pusdatin, Pusat Penelitian, Biro Protokol, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat														
		Penyusunan Standard Pelayanan	Standard Pelayanan	Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Biro Pimpinan, Biro Pemberitaan Parlemen, Pusat Pengawasan UU, Pusat Akutabilitas Keuangan Negara, Pusdatin, Pusat Penelitian, Biro Protokol, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat				√	√	√	√	√						
3.	Pembangunan/Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan	Penguatan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi	a. Laporan hasil evaluasi dan inovasi aplikasi	Pusdatin dan Biro Pemberitaan Parlemen										√	√			
			b. Sistem Penyiaran digital TV Radio Parlemen										√	√				
			c. Inovasi program siaran digital dan inovasi pemancarluasan siaran melalui satelit											√	√			
			d. Sistem arsip digital untuk pemberitaan website dan media sosial											√	√			
			e. Terbentuknya publishing house dan pengelola e-journal dan e-book												√	√		
4.	Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	a. Penyusunan Standard Pelayanan	SOP tentang Layanan di tiap Unit	Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II												√	√	
		b. Penyusunan Maklumat Pelayanan	Maklumat Layanan Publik													√	√	
		c. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	SK Sekjen tentang Standar Layanan di tiap Unit													√	√	

7